



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300/Kep. 482 - kabang polinmas / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN PURWAKARTA MASA BAKTI 2019 – 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional. Dipandang perlu meningkatkan upaya – upaya pembauran bangsa;
 - b. bahwa Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Purwakarta sebagai organisasi kemasyarakatan perlu meningkatkan peran dan fungsinya dalam usaha pembauran bangsa dan pembinaan kesatuan bangsa;
 - c. bahwa sejalan dengan pemberlakuan otonomi daerah serta perkembangan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu untuk diadakannya kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Purwakarta;
 - d. bahwa sehubungan telah habisnya masa bakti kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) masa bakti 2014 – 2019, maka perlu membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk masa bakti 2019 – 2024 berdasarkan hasil rapat pemilihan calon ketua pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tanggal 24 Oktober 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

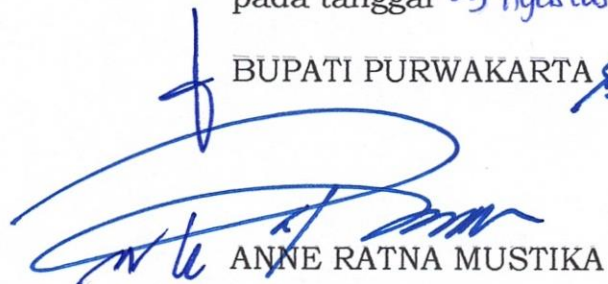
- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Purwakarta masa bakti 2019 – 2024.
- KEDUA : Susunan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Purwakarta merupakan mitra Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;

- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati Purwakarta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran bangsa.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Purwakarta Nomor 134/Kep.711.c-kesbangpol/2014 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Purwakarta masa bakti 2014 – 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

· LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300/Kep. 482 - Kesbang Polin mas/ 2019

TANGGAL : 29 Agustus 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN PURWAKARTA MASA BAKTI 2019 – 2024

A. SUSUNAN PENGURUS DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
(FPK) KABUPATEN PURWAKARTA MASA BAKTI 2019 – 2024

- I. Ketua : Wakil Bupati Purwakarta
- II. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
- III. Anggota :
 - 1. Assisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Unsur Kepolisian Resort Purwakarta;
 - 3. Unsur Komandan Distrik Militer 0619 Purwakarta;
 - 4. Unsur Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;
 - 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
 - 8. Kepala Bagian Hukum Setda;
 - 9. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

B. SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN
PURWAKARTA

- I. Dewan Penasehat :
 - 1. B Siallagan
 - 2. Sena Nelsen Rusli
 - 3. H. Busrol Karim, BA
- II. Dewan Pengurus
 - Ketua : Suherman
 - Wakil Ketua : Sudirman, SH, MM
 - Wakil Ketua : Pdt. Efori Gulo, M.Div
 - Wakil Ketua : Ny. Kartini Asih
 - Sekretaris : Drs. Tatang Sumarna
 - Wakil Sekretaris : Pdt. Ir. Osten Sitorus, MA
 - Bendahara : Ir. Abdurrahman
 - Wakil Bendahara : Ny. Elis Eliyana


III. Bidang – Bidang

Bidang Hukum dan Keorganisasian Budya : 1. MA. Apandi
Etnis 2. M. Yamin Alampati
3. Asmara Sutarya

Bidang Konservasi Budaya dan : 1. H. Endin Suryadin, BA
Persaudaraan Antar Etnis 2. Pdt. Yani Parengkuan
3. Acen Setiawan
4. I Wayan Giri Sudiara

Bidang Kaderisasi Generasi Budaya Etnis : 1. A.H. Baniadam, S.Pd
2. Pdt. Yopi Ardianto
3. Tjutju Suparman, SP

Bidang Kominfo dan Hubungan Antar - : 1. Ersan Syamsudin
Inter Etnis 2. Rudi Supriadi


BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA